

DAMPAK KEGIATAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR DI KABUPATEN SIAK¹

*(The Effect of Forest Commercial Right toward Socio-Economic
of Siak Community)*

Almasdi Syahza

**Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Universitas Riau Pekanbaru**

Email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net

Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

Abstrak

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di propinsi Riau yang memiliki potensi hutan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan yang mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH), melakukan kegiatan menggali potensi hutan. Penelitian yang merupakan *Development Reseach* ini bertujuan mengkaji dampak kegiatan HPH terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, antara lain: terhadap lembaga ekonomi, mobilitas penduduk, pemilikan lahan, peluang usaha, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan masyarakat. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan HPH menyebabkan: semakin sempitnya lahan pertanian; berkurangnya pemilikan lahan bagi masyarakat tempatan; sering terjadi konflik, baik antara masyarakat tempatan dengan pendatang, maupun dengan perusahaan HPH; berkembangnya kegiatan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*); serta tingginya mobilitas penduduk. Di sisi lain, kegiatan penebangan hutan dapat menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya, dan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Hak pengusahaan hutan, sosial ekonomi

Abstract

Siak district is located in Riau province that has highly potential tropical forestry. Many Forest Commercial Right (FCR) operate its business illegally there. The study was carried out to evaluate FCR activities and its effect on community sosial-economic, such as to institutional economic, mobilization of community, landowner, business challenge, employments, and income distribution in surrounding areas. Using purposive sampling methods, the study result showed that FCR caused decreasing agricultural areas and land owner of local community; intensifying illegal logging; rising conflict among communities; increasing mobilization of community. On the other side, forest cutting create business challenge, employment, income generating, and economic growth in the location.

Key words: Forest Commercial Right, Socio-Economic

¹ Dipublikasikan pada: *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Universitas Jenderal Soedirman, Vol 4 No 2 Agustus-November 2004, Purwokerto.

PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah penduduk mendorong meningkatnya permintaan hasil hutan untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup manusia. Keadaan ini akan mengakibatkan habisnya hutan apabila tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan dan pembangunan seluruh jenis hutan merupakan program Pemerintah Indonesia saat ini. Program tersebut bertujuan agar hutan dapat dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan umat manusia umumnya, baik masa kini maupun masa yang akan datang (Departemen Kehutanan, 2001).

Sektor kehutanan memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur pembangunan di Indonesia karena peran ekonomi dan lingkungan yang dimainkannya menyentuh berbagai kepentingan kehidupan. Hutan yang sangat kaya dengan ragam spesies, amat berpengaruh terhadap tata air dan tanah, mampu menghambat berlangsungnya pengaruh rumah kaca, serta memberikan berbagai manfaat barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Saragih (2001), hutan merupakan bagian ekosistem desa atau rakyat lokal. Pada masyarakat tradisional, hutan merupakan sumber kayu (kayu bakar dan bahan bangunan), sumber bahan obat-obatan, sumber bahan makanan, dan penyediaan air. Oleh karena begitu pentingnya hutan bagi masyarakat lokal, hutan harus dijaga kelestariannya melalui kelembagaan dan aturan lokal. Berbagai bentuk legenda dan dongeng dijadikan sebagai sarana pendidikan pelestarian hutan dari generasi ke generasi.

Pengusahaan hutan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mempunyai arti penting bagi pembangunan perekonomian, khususnya di daerah Riau. Pada masa pembangunan yang telah lalu, sektor kehutanan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin tingginya kebutuhan lahan untuk sektor lain serta terjadinya kebakaran hutan yang cukup luas, sumberdaya hutan khususnya sebagai penghasil kayu semakin menurun baik secara kualitatif maupun kuantitatif terutama pada hutan alam. Salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemerintah dan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH).

Kegiatan HPH seperti penebangan kayu secara besar-besaran untuk kebutuhan industri pengolahan kayu telah menimbulkan kemerosotan mutu lingkungan yang diderita masyarakat lokal. Terancamnya kelestarian sumberdaya air bagi masyarakat lokal akibat kerusakan hutan, polusi air dan udara yang disebabkan oleh industri pengolahan kayu telah mengancam kondisi kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat lokal boleh dikatakan tidak ikut menikmati hasil dari pemanfaatan hutan, tetapi harus menanggung dampak negatifnya, hal ini memicu perlawanan masyarakat lokal terhadap pengusaha HPH (Saragih, 2001)

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan HPH. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberadaan perusahaan HPH terhadap beberapa aspek sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar, antara lain mobilitas penduduk; pendidikan; lembaga ekonomi pedesaan; pemilikan lahan; serta peluang usaha dan kesempatan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat survei dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dengan alasan daerah tersebut merupakan lokasi HPH yang telah diusahakan sejak tahun 1980-an. Ukuran sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan rumus Cochran (1991):

$$n = \frac{\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2}}{1 + \frac{1}{N} \left[\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} - 1 \right]}$$

Dimana: n adalah ukuran sampel; P adalah proporsi sampel; Q=1-P; N merupakan ukuran populasi; Z merupakan nilai derivative normal terhadap probabilitas yang diinginkan; dan d merupakan standar error yang diinginkan.

Pada daerah penelitian ini terdapat 8.593 KK yang tersebar di sekitar wilayah HPH (desa penyangga). Penelitian ini menggunakan standar error sebesar 5 %, probabilitas keyakinan sebesar 95 %, maka diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Dari hasil perhitungan Cochran diperoleh ukuran sampel sebanyak 72 KK. Dari masing-masing desa penyangga diambil sampel secara proposional, yaitu dari desa Pinggir 12 KK, desa Balai Raja 3 KK, desa Pematang Pudu 18 KK, desa Petani 10 KK, dan dari desa Sam-sam sebanyak 29 KK.

Pengambilan sampel di masing-masing desa menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan analisis dampak sosial ekonomi di sekitar kawasan industri dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dilakukan analisis Gini Rasio, yang koefisien gininya membandingkan antara persentase pendapatan di antara kelompok-kelompok pendapatan masyarakat yang ada, dengan rumus sebagai berikut (Tambunan., 2001):

$$GR = 1 - \sum_i^n f_i (Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan: GR adalah angka gini rasio; f_i adalah proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i ; Y_i adalah proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i .

Angka GR berkisar antara 0 dan 1. Apabila angka GR sama dengan 0 berarti terdapat pemerataan pendapatan mutlak, dan jika sama dengan 1 terjadi ketimpangan mutlak dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial

1. Tingkat Pendidikan

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan pendidikan anak lebih tinggi dibandingkan pendidikan orang tua. Mereka menginginkan anaknya berpendidikan lebih tinggi, supaya kelak kehidupan anaknya jauh lebih baik dari orang tua. Namun demikian, sebagian masyarakat kelihatan pesimis untuk mampu mewujudkan harapan untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan keadaan perekonomian yang tidak menentu dan perolehan pendapatan yang rendah. Ada beberapa penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak dibandingkan dengan orang tua, khususnya masyarakat sekitar kegiatan HPH, yaitu (Syahza, 2002a): *Pertama*, kurangnya kesadaran dan motivasi untuk meningkatkan pendidikan anaknya; *Kedua*, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang mendukung. Masih ditemukan pada beberapa daerah yang belum memiliki sekolah; dan *ketiga*, letak wilayah yang terisih dan sukarnya pengangkutan. Kondisi ini sangat menonjol bagi masyarakat tempatan suku Sakai di

sekitar HPH. Hasil survey lapangan tentang tingkat pendidikan masyarakat sekitar lokasi HPH disajikan pada Tabel 1.

Rataan lama pendidikan adalah 6,92 tahun atau berpendidikan sederajat SLTP. Sebagian besar tingkat pendidikan orang tua adalah SD (43,06 %), demikian juga anak-anaknya berpendidikan SD (48,61 %). Mereka yang berpendidikan SMA umumnya bekerja di sektor perkebunan dan wiraswasta, sedangkan yang berpendidikan tingkat SLTP bekerja sebagai buruh industri, dan buruh harian lepas (BHL) perkebunan, dan pencari kayu di hutan. Dari sisi lain, sampel yang berpendidikan rendah sebesar 70,84 persen (SD dan SLTP) pada umumnya adalah masyarakat tempatan (penduduk asli), sedangkan sampel yang berpendidikan lebih lanjut pada umumnya pendatang yang mencari pekerjaan di sekitar wilayah HPH.

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Tertinggi Sampel

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Tertinggi Sampel			
		Orang Tua		Anak	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	Tidak Sekolah *	12	16,67	9	12,50
2.	Sekolah Dasar	31	43,06	35	48,61
3.	Sekolah Lanjutan Pertama	20	27,78	15	20,83
4.	Sekolah Lanjutan Atas	8	11,11	11	15,28
5.	Perguruan Tinggi	1	1,39	2	2,78
Jumlah		72	100,00	72	100,00
Rata-rata lamanya pendidikan orang tua		6,92 tahun (SLTP)			

*untuk anak sama dengan *Belum Sekolah*

Sumber: Data olahan

Sarana pendidikan baik bangunan sekolah maupun penyediaan guru sangatlah sukar dipenuhi, mengingat wilayah studi sebagian besar tersisih dan pengangkutan sangat sukar, sehingga sangat sedikit guru yang sanggup mengajar di daerah ini. Kenyataan ini mengakibatkan perkembangan pendidikan di desa sekitar areal pencadangan cukup memprihatinkan (Tabel 2).

Tabel 2 Fasilitas Pendidikan di Desa Sekitar Areal Kegiatan HPH

Keterangan	Desa									
	Pinggir		Balai Raja		Pematang Pudu		Petani		Sam-sam	
	Neg	Swst	Neg	Swst	Neg	Swst	Neg	Swst	Neg	Swst
Sekolah Dasar	1	-	1	-	2	-	4	1	3	1
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Guru SD	2	4	5	3	18	7	22	8	21	39
Guru SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18
Guru SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10

Sumber: Monografi Desa dari masing-masing desa, Tahun 2002.

2. Keadaan Penduduk

Secara sosial budaya, masyarakat sekitar kawasan ini cukup heterogen karena terdiri atas berbagai etnis, tetapi yang dominan adalah etnis Minang, Batak, Jawa, Cina, dan suku asli Sakai. Di antara mereka sudah terjadi asimilasi dan akulturasi secara baik

yang ditandai dengan adanya perkawinan antar-etnis. Selama periode tahun 1990-2000. tingkat pertumbuhan penduduk di sekitar daerah kegiatan HPH sebesar 11,89 persen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebanyak 57,97 persen dari penduduk adalah masyarakat pendatang, sedangkan sisanya masyarakat tempatan. Keadaan penduduk di daerah sekitar kegiatan HPH disajikan pada Tabel 3. Penduduk di sekitar areal berjumlah 37.231 jiwa yang terdiri atas 8.593 KK dengan 18.641 jiwa laki-laki dan 18.580 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 47 jiwa/km².

Tabel 3 Keadaan Penduduk Desa di Sekitar Areal Kegiatan HPH Tahun 2000

Kecamatan/Desa	Luas Km ²	Penduduk			Jumlah KK	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)		
Pinggir	230	3.571	3.615	7.186	1.426	31
Balai Raja	30	1.332	1.518	2.850	398	95
Pematang Pudu	25	5.812	5.712	11.534	2.156	461
Petani	207	3.260	3.336	6.596	1.175	32
Sam-sam	300	4.666	4.399	9.065	3.438	30
Jumlah (rata-rata)	792	18.641	18.580	37.231	8.593	47
Tingkat pertumbuhan rata-rata periode 1990-2000 sebesar 11,89 persen						

Sumber : Monografi dari masing-masing desa, Tahun 2002.

Tabel 4 Kelompok Umur Sampel

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1.	24 – 28	12	16,67
2.	29 – 33	22	30,56
3.	34 – 38	10	13,89
4.	39 – 43	6	8,33
5.	44 – 48	10	13,89
6.	49 – 53	2	2,78
7.	54 – 58	1	1,39
8.	59 – 63	5	6,94
9.	> 63	4	5,56
Jumlah		72	100,00
Rata-rata umur sampel 39,87 tahun			

Sumber: Data olahan.

Tabel 5 Jumlah Tanggungan Keluarga Sampel

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi	%
1	0	2	2,78
2	1	2	2,78
3	2	16	22,22
4	3	14	19,44
5	4	20	27,78
6	5	9	12,50
7	6	5	6,94
8	7	3	4,17
9	> 7	1	1,39
Jumlah		72	100,00
Rataan tanggungan keluarga 4 orang			

Sumber: Data olahan.

Berdasarkan struktur umur, sebagian penduduk (sampel) masih tergolong muda atau usia produktif. Penduduk yang berumur di bawah 40 tahun sekitar 60 % (Tabel 4); sedangkan jumlah tanggungan kepala keluarga relatif cukup tinggi. Kepala keluarga yang mempunyai tanggungan 3 orang atau lebih sebesar 71,72 %. Keluarga yang mempunyai tanggungan besar ini bukan saja karena banyak anak, melainkan mereka membawa anggota keluarga dari kampung halaman seperti mertua, adik, keponakan dan lain-lain (Tabel 5). Hal ini disebabkan kegiatan HPH di daerah ini merupakan salah satu faktor penarik terjadinya migrasi penduduk.

3. Lembaga-lembaga Pelayanan Masyarakat

Lembaga pelayanan yang dibentuk pemerintah bagi masyarakat adalah lembaga pendidikan (SD), lembaga kesehatan (Puskesmas, Posyandu), serta lembaga keamanan (Hansip) dan pemerintahan desa itu sendiri. Ketiga lembaga tersebut belum memberikan fungsi yang optimum bagi masyarakat karena masih ada beberapa kekurangan fasilitas dan tenaga yang melayani. Lembaga adat merupakan swadaya yang paling berpengaruh, sehingga fungsinya memenuhi beragam kebutuhan masyarakat yang dilakukan turun-temurun dan terdapat pada semua desa, sehingga digolongkan sebagai lembaga masyarakat.

Lembaga ekonomi pedesaan seperti koperasi belum berkembang, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap koperasi. Padahal koperasi merupakan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurut Wijaya (2002), manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesaan bisa tumbuh karena koperasi berakut kuat di pedesaan.

Hak ulayat, baik atas nama lembaga adat maupun perorangan yang berkaitan dengan areal kerja HPH, sejauh ini belum teridentifikasi sesuai dengan konsep hukum berdasarkan luas wilayah administrasi pemerintahan desa. Atas dasar ketentuan yang telah diatur di dalam Forestry Agreement (FA) maupun peraturan perundangan yang berlaku, maka keberadaan hak ulayat maupun kawasan yang menurut administrasi pemerintahan secara definitif telah menjadi kawasan pemukiman dan ladang, akan tetap dihormati oleh perusahaan pemegang HPH di antaranya melalui kegiatan tata batas dan pengukuhan.

Kondisi Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk sekitar areal kegiatan HPH ini adalah pertanian, yaitu pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Jenis tanaman pangan yang diusahakan, antara lain ubi-ubian, jagung, kacangangan dan sayuran, sedangkan jenis tanaman perkebunan yang banyak diusahakan adalah karet, kelapa sawit, dan kelapa. Luas areal pertanian masyarakat pada umumnya kecil dari 0,5 Ha. Mata pencaharian lainnya meliputi pengrajin, pencari hasil hutan, PNS, pedagang, dan buruh (Tabel 6).

Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Sekitar Kegiatan HPH

No	Mata Pencaharian	Nama Desa					Jumlah	%
		Ping-gir	Balai Raja	Pematang Pudu	Petani	Sam-sam		
1	Petani	582	437	250	1.569	2.650	5.488	32,74
2	Pencari Hasil Hutan	126	7	350	27	76	586	3,50
3	Pengrajin	49	2	10	9	27	97	0,58
4	PNS	139	64	195	16	350	764	4,56
5	ABRI	1	1	4	1	6	13	0,07
6	Pedagang	251	-	139	54	380	824	4,92
7	Buruh	25	-	3.541	397	4.850	8.813	52,57
8	Lainnya	145	3	-	30	-	178	1,06

Sumber: Survei lapang.

2. Peluang Kerja dan Usaha

Salah satu dampak keberadaan kegiatan perusahaan HPH adalah timbulnya peluang kerja dan usaha di daerah sekitarnya. Besarnya dampak ini antara lain akan tergantung kepada jenis usaha, produk yang dihasilkan, kaitan (lingkages) investasi yang ditanamkan, dan kondisi lokal tempat kegiatan tersebut dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan dampak kawasan HPH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan HPH di Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Minas, sejak tahun 1987 belum banyak memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya, kecuali penyerapan tenaga kerja untuk buruh harian lepas. Dari hasil wawancara dapat diungkapkan bahwa, kegiatan HPH oleh perusahaan belum membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya (Tabel 7).

Lebih dari 50% responden mengatakan, generasi sekarang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bahkan sebanyak 26,39 persen mengatakan sangat sukar mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya mereka yang terakhir ini adalah yang baru tamat sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan. Hanya sebanyak 19,44 % responden yang menyatakan mudah untuk mendapat pekerjaan.

Berhubungan dengan pengembangan usaha, 36,11 % responden menyatakan mudah untuk mengembangkan usaha. Hanya 11 % mengatakan sukar dan 15 % mengatakan sangat sukar (Tabel 8). Rendahnya tingkat kesulitan dalam pengembangan usaha di kawasan kegiatan HPH ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan HPH di daerah Minas memberikan peluang usaha bagi mereka yang mempunyai keterampilan.

Mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor sekunder. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil, yaitu pedagang (dagang barang harian, dagang karet, tiket angkutan, dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa dan purnawirawan ABRI), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, pencari ikan, pencari kayu di hutan, dan tukang kayu (Syahza, 2002b).

Dari hasil survei di lokasi sekitar kegiatan HPH (desa penyangga HPH) diperoleh pendapatan masyarakat berkisar Rp632.253,81 per bulan. Lebih jelasnya, hasil survei disajikan pada Tabel 9. Banyaknya sampel yang berpenghasilan di bawah Rp500.000

disebabkan oleh sebagian besar masyarakat berusaha di sektor pertanian dan jasa (buruh) yang memberikan balas jasa kecil. Penyebab lain kemungkinan besar adalah rendahnya pendidikan sampel, sehingga mereka yang bekerja sebagai karyawan perusahaan HPH dan perkebunan hanya sebagai buruh kasar yang memberikan tingkat upah yang rendah.

Tabel 7 Tingkat Kesulitan Generasi Saat Ini Mendapatkan Pekerjaan

No	Tingkat Kesulitan	Frekuensi	%
1.	Sangat sulit	19	26,39
2.	Sulit	20	27,78
3.	Agak sulit	19	26,39
4.	Mudah	14	19,44
Jumlah		72	100,00

Sumber: Data olahan.

Tabel 8 Tingkat Kesulitan Pengembangan Usaha Saat Ini

No	Tingkat Kesulitan	Frekuensi	%
1	Sangat sulit	15	20,83
2	Sulit	11	15,28
3	Agak sulit	20	27,78
4	Mudah	26	36,11
Jumlah		72	100,00

Sumber: Data olahan.

Penyebab lain rendahnya pendapatan mereka kemungkinan oleh faktor pendidikan dan keterampilan serta faktor sosial budaya masyarakat yang belum siap menerima budaya ekonomi modern, sehingga terjadi alienasi masyarakat dari lembaga ekonomi modern (Syahza, 2001). Di satu pihak masyarakat tempatan merasa keberadaan kawasan HPH tidak membawa banyak manfaat bagi mereka karena mereka tidak bisa ikut terlibat secara berarti, sementara pihak perusahaan merasa telah memberi kesempatan yang luas tetapi masyarakat yang tidak mau ikut terlibat. Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa mayoritas masyarakat yang tertinggal adalah masyarakat lokal, sedangkan masyarakat pendatang relatif lebih dapat memanfaatkan peluang yang ada, yang ditimbulkan oleh adanya aksesibilitas ke pusat pertumbuhan.

Secara umum, dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan HPH telah menyebabkan munculnya sumber pendapatan baru yang beragam. Sebelum dibukanya kawasan HPH di kecamatan Minas, sampel mengungkapkan sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan, pada umumnya masyarakat hidup dari sektor perikanan, dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas.

Sumber pendapatan masyarakat setelah adanya HPH semakin beragam. Keragaman ini akan semakin memperkuat kestabilan struktur pendapatan rumah tangga, karena memberikan pilihan pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Hal kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan (Basri, 2003).

3. Distribusi Pendapatan

Gambaran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di kawasan kegiatan HPH disajikan pada Tabel 10, yang 40 persen masyarakatnya berpendapatan terendah memperoleh hanya 13,96 persen dari total pendapatan, sementara 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menikmati 52,56 persen dari total pendapatan. Apabila dikaitkan dengan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, maka ketimpangan pendapatan di sekitar kawasan kegiatan HPH termasuk sedang. Akan tetapi, dilihat dari segi perbandingan

Tabel 9 Kelompok Pendapatan Masyarakat Sampel

No	Kelompok Pendapatan (Rp)	Frekuensi	%
1.	< 500.000	44	61,11
2.	500.001 – 1.000.000	22	30,56
3.	1.000.001 – 1.500.000	3	4,17
4.	1.500.001 – 2.000.000	2	2,78
5.	> 2.000.000	1	1,39
Jumlah		72	100,00
Rata-rata pendapatan sampel		Rp 632.253,81	

Sumber: Data olahan.

indeks ketimpangan Gini Ratio menunjukkan, di daerah penyangga lokasi kawasan HPH terdapat ketimpangan pendapatan yang tinggi dengan Gini Ratio sebesar 0,443. Perbandingan antara pendapatan masyarakat tertinggi dengan pendapatan masyarakat terendah sebesar 3,77, artinya pendapatan dari 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tinggi adalah 3,77 kali lipat dari pendapatan 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Relatif tingginya ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat sampel ini disebabkan pada lokasi penelitian merupakan daerah pertumbuhan sebagai akibat kegiatan HPH.

Tabel 10 Persentase Penduduk Menurut Persentase Pendapatan Masyarakat (sampel)

Kelompok Pendapatan Masyarakat	Persentase dari Total Pendapatan
40 % pendapatan terendah	13,96
40 % pendapatan sedang	33,48
20 % pendapatan tertinggi	52,56
Jumlah	100,00
Perbandingan Pendapatan Tertinggi dgn terendah 3,77	
Gini Ratio	0,443404

Sumber: Data olahan

Ketimpangan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan kegiatan HPH, terutama terjadi antara masyarakat asli dengan pendatang. Masyarakat asli masih terpusat dengan kegiatan tradisional, seperti pertanian, mencari ikan, dan pencari kayu, sementara masyarakat pendatang telah terlibat dengan kegiatan HPH, perkebunan, dan jasa yang memberikan balas jasa yang tinggi dibandingkan sektor tradisional. Sejak dibukanya wilayah HPH, membuka peluang juga bagi masyarakat pendatang untuk kegiatan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*), karena di wilayah ini sudah ada jalan perusahaan HPH yang dapat dimanfaatkan bagi penebang kayu liar tersebut (Syahza, 2002a). Kondisi ini juga mengundang konflik masyarakat tempatan (suku Sakai) dengan pihak perusahaan HPH.

Faktor lain yang mungkin menimbulkan ketimpangan adalah adanya usaha sampingan bagi masyarakat yang berada di sekitar areal kegiatan HPH (terutama pusat pertumbuhan), seperti warung, berdagang, transportasi, dan jasa yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Begitu juga pengaruh budaya dalam masyarakat pedesaan yang menerima apa adanya, tidak ada inisiatif untuk mengembangkan usaha lain, produktivitas rendah, dan masih mengandalkan hasil yang diperoleh dari alam terutama karet, ikan dan pertanian karena lebih mudah dan tidak banyak mengurus tenaga (Syahza, 2002b).

Fasilitas perekonomian yang ditemukan di daerah penyangga sekitar rencana kegiatan HPH, antara lain toko, kios dan pasar umum terdapat di desa dan kota kecamatan. Di samping itu, di desa penyangga juga terdapat warung sederhana, yang hanya menyediakan kebutuhan makanan sehari-hari masyarakat yang tidak dapat dihasilkan sendiri.

4. Pemilikan dan Penguasaan Sumberdaya Lahan

Perkembangan penguasaan dan pemilikan tanah per kepala keluarga di daerah penyangga kawasan HPH Kecamatan Minas dapat diamati pada Tabel 11, sebanyak 51,39 persen sampel tidak memiliki lahan pertanian kecuali tanah untuk perumahan. Mereka yang tidak memiliki lahan ini pada umumnya masyarakat asli dan sebagian kecil pendatang. Lahan disini adalah lahan pertanian yang dijadikan sebagai sumber pendapatan, baik sebagai mata pencarian pokok maupun sebagai mata pencarian tambahan. Sampel yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 ha sebanyak 15,28 persen. Mereka ini pada

umumnya penduduk asli yang tinggal agak ke pinggir jalan utama (terutama jalan perusahaan) dan sebagian penduduk pendatang.

Petani yang memiliki lahan di atas 0,5 Ha sebagian besar pendatang. Mereka ini membeli tanah dari masyarakat asli. Sumber modal diperoleh dari hasil pengembangan usaha yang terkait kawasan HPH. Dari pihak masyarakat asli yang menjual tanah pada umumnya disebabkan desakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 11 Pemilihan Lahan Pertanian Sampel Per Kepala Keluarga

No	Luas Lahan (Ha)	Frekuensi	%
1.	Tidak memiliki	37	51,39
2.	< 0,50	11	15,28
3.	0,60 – 1,00	7	9,72
4.	1,00 – 1,50	7	9,72
5.	1,60 – 2,00	4	5,56
6.	>2,00	6	8,33
Jumlah		72	100,00
Rata-rata pemilikan lahan 0,49 Ha per KK			

Sumber: Data olahan.

Kesimpulan

1. Tingkat pendidikan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan HPH masih rendah. Sebagian besar orang tua pesimis terhadap pendidikan anaknya, karena keadaan perekonomian yang tidak menentu dan perolehan pendapatan yang rendah. wilayah studi sebagian besar tersisih dan pengangkutan sangat sulit.
2. Masyarakat sekitar kawasan HPH cukup heterogen karena terdiri atas berbagai etnis, antara lain etnis Minang, Batak, Jawa, Cina, dan suku asli Sakai. Sebagian besar berpenduduk (sampel) masih tergolong muda atau usia produktif. Tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi yakni 11,89 % per tahun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peluang usaha dan kesempatan kerja di sekitar areal kegiatan HPH, sehingga tingkat migrasi penduduk tinggi.
3. Sebagaimana besar mata pencaharian penduduk sekitar areal kegiatan HPH adalah pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Jenis tanaman pangan yang diusahakan, antara lain ubi-ubian, jagung, kekacangan dan sayuran, sedangkan jenis tanaman perkebunan yang banyak diusahakan adalah karet, kelapa sawit, dan kelapa. Luas areal pertanian masyarakat pada umumnya kecil dari 0,5 Ha.
4. Dampak kegiatan perusahaan HPH adalah timbulnya peluang kerja dan usaha di daerah sekitarnya, antara lain pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan, dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa, dan purnawirawan ABRI), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, pencari ikan, pencari kayu di hutan, dan tukang kayu.
5. Tingkat pendapatan masyarakat tempatan masih relatif rendah, yaitu Rp632.253,00 per KK per bulan. Sementara, tingkat pendapatan masyarakat pendatang relatif tinggi, sehingga ketimpangan pendapatan di daerah penelitian cukup tinggi dengan Gini Rasio sebesar 0,443404.
6. Kegiatan HPH menyebabkan berkurangnya pemilikan lahan bagi masyarakat tempatan, sering terjadi konflik antara masyarakat pendatang maupun dengan pihak perusahaan HPH. Konflik timbul karena masalah perebutan lahan dan kegiatan *illegal logging*.

Rekomendasi

1. Perlu dibangun hutan kehidupan oleh perusahaan HPH guna menekan terjadinya kecemburuan sosial dan konflik terutama untuk masyarakat tempatan. Pembangunan

- hutan kehidupan ini harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan dan animo masyarakat yang saling menguntungkan antara masyarakat tempatan dengan perusahaan HPH.
2. Diperlukan suatu upaya dalam bentuk gerakan dari perusahaan berupa program bina desa untuk pembinaan dan penyuluhan dari aspek sosial ekonomi, teknologi, dan kelembagaan secara berkelanjutan dan terprogram. Hal ini dapat mendorong kegairahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang menunjang upaya mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tempatan.
 3. Perlunya upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia berusia muda masyarakat tempatan dengan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

Daftar Pustaka

- Basri, YZ., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Hal 49-55, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Cochran, G., 1991. *Teknik Penarikan Sampel*, UI-Press, Jakarta.
- Departemen Kehutanan., 2001, *Isu-isu pokok yang diidentifikasi oleh Pokja NFP Dephut untuk menyusun Pernyataan Hutan Nasional melalui partisipasi multi-stakeholders*, http://www.dephut.go.id/informasi/intag/NFP/Is_NFP_i.htm, Last Update: 3 September 2001, Diakses tanggal 18 April 2002
- Saragih, B. 2001. *Suara dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*, USESE dan SUCUFINDO, Bogor.
- Syahza, A. 2001. Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Industri di Kabupaten Bengkalis, dalam *Jurnal Mon Mata*, Nomor 43 September 2001, Lembaga Penelitian Universitas Syaiah Kuala, Hal 79-90, Banda Aceh.
- , 2002a. *Studi Kelayakan Hutan Tanaman Industri PT Rokan Permai Timber di Kabupaten Siak*, P2TP2 Universitas Riau, Pekanbaru.
- , 2002b. *Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rokan Permai Timber Di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau*, PT Rokan Permai Timber, Pekanbaru.
- Tambunan, TTH., 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya, NHS., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia*, NO. 07/TH. XXXI Juli 2002, Hal 28-34, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta